

LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI
DENGAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SENIN, 21 NOVEMBER 2011

| | |
|------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2011-2012 |
| Masa Persidangan | : II |
| Rapat Ke | : -- |
| Sifat | : Terbuka |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat |
| Dengan | : Kepala Badan Pertanahan Nasional |
| Hari/Tanggal | : Senin, 21 November 2011 |
| Pukul | : 14.00 WIB - selesai |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III) |
| Ketua Rapat | : Drs.Abdul Hakam Naja, M.Si/Wakil Ketua Komisi II DPR RI |
| Sekretaris Rapat | : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI |
| Acara | : Tindaklanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun Anggaran 2011 dan Progress Report Pelaksanaan ABPN Tahun Anggaran 2011 |
| Kehadiran | : 31 dari 48 Anggota Komisi II DPR RI 18 orang izin |

HADIR :

- | | |
|---|--------------------------------|
| ◆ Dr. H. Chairuman Harahap, SH.,MH | ◆ Arif Wibowo |
| ◆ Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si | ◆ Dra. Eddy Mihati, M.Si |
| ◆ H. Abdul Wahab Dalimunte, SH | ◆ Zainun Ahmadi |
| ◆ Drs. Ramadhan Pohan, MIS | ◆ Dr. Yasonna H. Laoly, SH.,MA |
| ◆ Khatibul Umam Wiranu, SH.,M.Hum | ◆ Alexander Litaay |
| ◆ Drs. H. Abdul Gafar Patappe | ◆ H.M. Gamari Sutrisno |
| ◆ Gede Pasek Suardika, SH.,MH | ◆ Hermanto, SE.,MM |
| ◆ Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd | ◆ H. Yan Herizal, SE |
| ◆ Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc | ◆ Aus Hidayat Nur |
| ◆ Paula Sinjal, SH | ◆ Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si |
| ◆ Rusminiati, SH | ◆ Drs. H. Fauzan Syai'e |
| ◆ Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM | ◆ Drs. H. Akhmad Muqowam |
| ◆ Drs. Taufiq Hidayat, M.Si | ◆ Abdul Malik Haramain, M.Si |
| ◆ Dr. Hj. Mariani Akib Baramuli, MM | ◆ Mestariyany Habie, SH |
| ◆ Agustina Basik-Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd | ◆ Drs. Akbar Faizal, M.Si |
| ◆ Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si | |

IZIN :

- | | |
|--|------------------------------------|
| ◆ Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA | ◆ Budiman Sudjarmiko, M.Sc.,M.Phil |
| ◆ Ganjar Pranowo | ◆ H. Rahman Amin |
| ◆ Drs. H. Djufri | ◆ Agus Purnomo, S.IP |
| ◆ Ignatius Mulyono | ◆ H. Chairul Naim. M.Anik, SH.,MH |
| ◆ Nurul Arifin S.IP.,M.Si | ◆ Drs. H. Nu'man Abdul Hakim |
| ◆ Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si | ◆ Dr. AW. Thalib, M.Si |
| ◆ Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus | ◆ Dra. Hj. Ida Fauziyah |
| ◆ Drs. Soewarno | ◆ Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si |
| ◆ H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH | ◆ Miryam S. Haryani, SE.,M.Si |

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional dibuka pukul 15.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/F-PAN dan dinyatakan terbuka.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Hasil tindaklanjut yang dilakukan oleh BPN atas pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun 2011, yakni :
 - Tindaklanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 183 kasus dengan nilai Rp7.198.897.756,-.
 - Tindaklanjut yang belum sesuai dengan rekomendasi adalah sebanyak 48 Kasus dengan nilai Rp296.419.703,-
 - Rekomendasi LHP yang belum ditindaklanjuti sebanyak 29 Kasus dengan nilai Rp12.000.000,-
2. Pada Tahun 2011 BPN mendapat alokasi sebesar Rp3.695.099.758.000,-. Realisasi Anggaran sampai dengan akhir Oktober 2011 sebesar Rp2.625.972.449.000,- atau 71,06%. Adapun realisasi atas berbagai kegiatan pertanahan tersebut antara lain:
 - Pembangunan Peta Pertanahan, hingga akhir Oktober 2011 telah dilakukan dengan hasil capaian sebesar 4.110.000 Ha, yang terdiri atas pembangunan Jaringan Sistem Referensi Pertanahan (JRSP), Peta Dasar, Peta Tematik dan Peta Potensi Nilai Tanah.
 - Legalisasi Aset Tanah, hingga akhir Oktober 2011, legalisasi aset tanah tersebut, yakni : Prona sebanyak 369.073 bidang (65,1%), UMK sebanyak 13.746 bidang (68,7%), Transmigrasi sebanyak 66.734 bidang (41,8%), Tanah Pertanian sebanyak 16.700 bidang (66,8%), Tanah Nelayan sebanyak 6.381 bidang (70,9%), dan Tanah Untuk Perumahan Rakyat sebanyak 5.361 bidang (71,5%).
 - Redistribusi Tanah, hingga akhir Oktober 2011 telah diselesaikan sebanyak 69.486 KK dengan luasan 119.083,1285 Ha yang tersebar di 18 Provinsi dan 74 Kabupaten/Kota dari Target 181.825 KK.
 - Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar, hingga akhir Oktober 2011 yang telah diproses penerbitannya pada berbagai tahapan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010. Dalam Tahun 2011 target yang akan diterbitkan sebanyak 862 Satuan Pekerjaan dengan luasan 2.314.206,8863 Ha.
 - Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, hingga akhir Oktober 2011 berdasarkan kriteria-kriteria capaian penyelesaian kasus, sebagai berikut :
 - Kriteria 1 (K1) : penerbitan surat pemberitahuan penyelesaian kasus sebanyak 2.073 Kasus;
 - Kriteria 2 (K2) : penerbitan surat Keputusan tentang pemberian hak atas tanah sebanyak 101 Kasus;
 - Kriteria 3 (K3) : Pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan yang ditindaklanjuti mediasi oleh BPN sebanyak 952 Kasus,

- Kriteria 4 (K4) : Pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan yang proses perkara di pengadilan sebanyak 1.819 Kasus; dan
 - Kriteria 5 (K5) : Pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan yang bukan termasuk kewenangan BPN sebanyak 721 Kasus.
3. Mengenai tanah-tanah terlantar, BPN sudah melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap tanah-tanah terlantar sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Secara prinsip yang dimaksud dengan tanah terlantar adalah tanah yang tidak dimanfaatkan, kemudian tanah yang peruntukannya tidak melanggar aturan.
 4. Dalam kaitannya dengan Penyusunan peraturan perundang-undangan, BPN saat ini sedang menyiapkan dua Rancangan Undang-Undang dan satu Rancangan Peraturan Pemerintah. Rancangan UU tersebut adalah RUU tentang Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum, yang saat ini sedang dibahas pemerintah bersama dengan DPR, satu lagi adalah RUU tentang Pertanahan, RUU ini sekarang dalam penyusunan Naskah Akademik dan Materi UU nya diharapkan RUU ini sudah dapat dibahas pada tahun 2012 .
 5. Komisi II DPR RI meminta BPN agar menyelesaikan kasus-kasus pertanahan, terutama kasus-kasus pertanahan yang menyangkut banyak orang dan berkaitan dengan aset negara dan aset BUMN. Kasus-kasus tanah yang menyangkut PTPN seperti kasus tanah PTPN II di Sumatera Utara dan kasus tanah PTPN XII di Jawa Timur sudah berlarut-larut tanpa ada penyelesaian yang jelas, sehingga sangat berpotensi menimbulkan konflik sosial. Semestinya BPN harus proaktif menyelesaikan kasus ini, bila hal itu berkaitan dengan aset BUMN yang harus mendapat persetujuan dari Kementerian yang bersangkutan, kepala BPN dapat menginisiasi pelepasan hak itu kepada Presiden agar presiden yang memerintahkan jajaran kabinetnya untuk melepaskan tanah tersebut. Oleh karena itu, lambatnya penyelesaian kasus tanah di Indonesia ini adalah karena tidak adanya Political will dari pemerintah.

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan Kepala Badan Pertanahan Nasional menyampaikan paparan dan penjelasannya serta memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pendapat/pandangannya serta saran dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada BPN atas upaya-upaya yang telah dilakukan BPN dalam meningkatkan kinerjanya dibidang Tata Kelola Keuangan dan administrasinya, sehingga opini Disclaimer yang diberikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan BPN Tahun 2006-2009, bisa ditingkatkan menjadi WDP (Wajar Dengar Pengecualian) berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2011 terkait dengan Laporan Keuangan BPN Tahun 2010.
2. Komisi II DPR RI mendesak BPN untuk segera menindaklanjuti masalah-masalah yang menjadi temuan BPK RI pada hasil pemeriksaan BPK Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011. Komisi II DPR RI juga mendorong BPN

untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya sehingga pada pemeriksaan BPK RI di tahun-tahun selanjutnya bisa memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3. Komisi II DPR RI meminta kepada BPN untuk segera merealisasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sehingga tingkat penyerapan anggaran Tahun 2011 bisa lebih dioptimalkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi II DPR RI juga meminta kepada BPN untuk menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011 pada masing-masing Satuan Kerja yang ada di BPN.
4. Sebagai upaya untuk mempercepat penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, Komisi II DPR RI meminta kepada BPN untuk mengkaji kembali peraturan-peraturan yang telah diterbitkan yang justru menimbulkan masalah. Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi II DPR RI juga meminta kepada BPN agar dalam mengeluarkan perpanjangan HGU, harus dilaksanakan secara selektif dan penuh kehati-hatian.
5. Terkait dengan Prona, Komisi II DPR RI meminta kepada BPN agar membuat aturan yang jelas yang tidak membingungkan masyarakat, karena masih banyak ditemukan dilapangan pungutan-pungutan yang membebani masyarakat dalam program ini. Disamping itu, Komisi II DPR RI juga meminta kepada BPN agar menambah sumber daya manusia khususnya tenaga ukur, agar bisa mencapai target dalam rangka legalisasi aset pertanahan bagi masyarakat.

Rapat ditutup Pukul 17.30 WIB.

**Jakarta, 21 NOVEMBER 2011
PIMPINAN KOMISI II DPR RI
WAKIL KETUA,**

**Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si
A-126**